

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN CIREBON**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan sosial, disesuaikan dengan Visi dan Misi. Visi Kabupaten Cirebon adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.** Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu dari Misi ke 5 yaitu : **“MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYAN STABILITAS NASIONAL”**

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

* + - 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas kesosialan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
      2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
  1. **Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendlaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemrintahan.
11. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM**

* 1. **Visi dan Misi**

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Cirebon yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis, dan Sejahtera (Amanah)”, maka untuk mewujudkan cita- cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***

Adapun misi yang dirumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah misi kelima yaitu :

***“Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional”***

* 1. **Tujuan Misi**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Cirebon, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan, Menurunkan indeks risiko bencana.

* 1. **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan Badam Penanggulangan Bencana Daerah, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2023 adalah : Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD).

* 1. **Strategi dan Kebijakan**

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Cirebon dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (Growth) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro disbanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk , pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

Tabel 4.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI) | Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana | Meningkatkam efektivitas penanggulangan bencana |
| Pengurusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan | Penguatan tata kelola penanggulangan bencana |
| Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana | Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana |
| Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana | Penguatan tata kelola penanggulangan bencana |
| Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |
| Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |
| Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana | Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana |

* 1. **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dan dibuat dalam Rubahan Rencana Kerja Tahun 2023, sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan, antara lain;

* 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, memiliki 5 (lima) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan **:**

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporamn Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
9. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan sebagai berikut
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang- Undangan
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan diantara sebagai berikut :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut
   * + 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
       2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
       3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
       4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   1. **Program Penanggulangan Bencana,** memiliki 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
2. **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
4. **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,** dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,** dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana,** dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
4. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
5. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota

**BAB III**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

* 1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing- masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya rubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakann manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan- kepuutusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

* 1. **Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. **Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022.**

Analisis atas Pencapaian Sasaran

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (Satu) sasaran dan 1 (satu) indikator yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | KET |
| Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI) | % | 150,80 | 150,80 | 100 | Tercapai |

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam indikator menurunnya indeks risiko bencana memiliki target 150,80 dan terealisasi 150,80.

**Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI) | 5.984.977.100 | 4.684.423.815 | 78,27 |
| 3.246.638.300 | 3.149.070.000 | 96,99 |

**Analisis Efisiensi dan Efektivitas**

Komposisi efisiensi dan efektifitas pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon** | | | | |
| **No** | **Unit kerja** | **PNS** | **Honorer** | **Jumlah** |
| 1. | Kepala Pelaksana | 1 | **-** | 1 |
| 2. | Sekretaris | 8 | 12 | 20 |
| 3. | Kasie Kedaruratan dan Logistik | 5 | 29 | 34 |
| 4. | Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 4 | 2 | 6 |
| **JUMLAH** | | 22 | 45 | 67 |

* Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17. | Gol. IV/e  Gol. IV/d  Gol. IV/c  Gol. IV/b  Gol. IV/a  Gol. III /d  Gol. III /c  Gol. III /b  Gol. III /a  Gol. II/d  Gol. II/c  Gol. II/b  Gol. II/a  Gol. I/d  Gol. I/c  Gol. I/b  Gol. I/a | -  -  -  1  1  3  3  3  -  3  2  1  1  1  -  -  - | -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  1  4  3  4  3  -  3  2  1  1  1  -  -  - |
|  | JUMLAH TOTAL | 19 | 4 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Tahun 2021** | | **Program** | **Tahun 2022** | |
| **APBD** | **Realisasi** | **APBD** | **Realisasi** |
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.043.364.480 | Rp. 2.559.534.973 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.984.977.100 | Rp. 4.684.423.815 |
| 2. | Penanggulangan Bencana | Rp. 2.345.520.600 | Rp. 2.164.664.333 | Penanggulangan Bencana | Rp. 3.246.638.300 | Rp. 3.149.070.000 |
| **Jumlah** | | **Rp. 5.388.885.080** | **Rp. 4.724.199.306** | **Jumlah** | **Rp. 9.231.615.400** | **Rp. 7.833.493.815** |

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**

**BPBD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN** | **Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-** | | | | |
| **Th 2020** | **Th 2021** | **Th 2022** | **Th 2023** | **Th 2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI) | Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD) | Indeks Resiko Bencana | 165.80 | 160.80 | 155.80 | 150.80 | 145.80 |
| Indeks Ketahanan Daerah | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.79 |

1. **Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci dalam Triwulan 4 tahun 2022 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Urusan, Program, Kegiatan. Dan Sub Kegiatan** | | | | | | |
| **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | |
| **Tahun Anggaran 2022** | | | | | | |
| **Bulan : Desember** | |  |  |  |  |
| **No** | **Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Rencana**  **Tahun 2022 (Rp)** | **Realisasi**  **Tahun 2022 (Rp)** | **Sisa**  **Tahun 2022 (Rp)** | **Penyerapan %** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Belanja Daerah** | | **Rp 9,231,615,400** | **Rp 7,833,493,815** | **Rp 1,398,121,585** | **84.86** |
| **Belanja Operasi** | | **Rp 8,927,163,500** | **Rp 7,529,128,415** | **Rp 1,398,035,085** | **84.34** |
| **Belanja Modal** | | **Rp 304,451,900** | **Rp 304,365,400** | **Rp 86,500** | **99.97** |
| **01:01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp 5,984,977,100** | **Rp 4,684,423,815** | **Rp 1,300,553,285** | **78.27** |
| **A.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Rp 31,813,100** | **Rp 31,813,100** | **Rp -** | **100** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 24,565,100 | Rp 24,565,100 | Rp - | 100 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 7,248,000 | Rp 7,248,000 | Rp - | 100 |
| **B.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rp 3,844,264,800** | **Rp 3,589,026,465** | **Rp 255,238,335** | **93.36** |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3,827,982,400 | Rp 3,572,744,065 | Rp 255,238,335 | 93.33 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 8,474,000 | Rp 8,474,000 | Rp - | 100 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Rp 7,808,400 | Rp 7,808,400 | Rp - | 100 |
| **C.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rp 33,440,000** | **Rp 33,440,000** | Rp - | **100** |
| 6 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 33,440,000 | Rp 33,440,000 | Rp - | 100 |
| **D.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rp 502,669,900** | **Rp 484,476,300** | **Rp 18,193,600** | **96.38** |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Rp 15,159,600 | Rp 15,159,600 | Rp - | 100 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 115,033,000 | Rp 115,033,000 | Rp - | 100 |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 6,085,000 | Rp 6,085,000 | Rp - | 100 |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 14,216,600 | Rp 14,215,700 | Rp 900 | 100 |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 21,591,200 | Rp 21,591,200 | Rp - | 100 |
| 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 22,500,000 | Rp 22,500,000 | Rp - | 100 |
| 13 | Penyediaan Bahan/ Material | Rp 41,017,000 | Rp 41,017,000 | Rp - | 100 |
| 14 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp 6,900,000 | Rp 6,551,000 | Rp 349,000 | 94.94 |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 247,857,500 | Rp 232,913,800 | Rp 14,943,700 | 93.97 |
| 16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp 12,310,000 | Rp 9,410,000 | Rp 2,900,000 | 76.44 |
| **E.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rp 190,639,200** | **Rp 189,702,700** | **Rp 936,500** | **99.51** |
| 17 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 149,121,500 | Rp 148,485,000 | Rp 636,500 | 99.57 |
| 18 | Pengadaan Mebel | Rp 41,517,700 | Rp 41,217,700 | Rp 300,000 | 99.28 |
| **F.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rp 60,806,800** | **Rp 25,127,550** | **Rp 35,679,250** | **41.32** |
| 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 39,729,600 | Rp 4,050,350 | Rp 35,679,250 | 10.19 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 21,077,200 | Rp 21,077,200 | Rp - | 100 |
| **G.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rp 1,321,343,300** | **Rp 330,837,700** | **Rp 990,505,600** | **25.04** |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 138,517,300 | Rp 129,876,800 | Rp 8,640,500 | 93.76 |
| 22 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 60,540,000 | Rp 60,540,000 | Rp - | 100 |
| 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 1,122,286,000 | Rp 140,420,900 | Rp 981,865,100 | 12.51 |
| **01:02** | **Program Penanggulangan Bencana** | **Rp 3,246,638,300** | **Rp 3,149,070,000** | **Rp 97,568,300** | **96.99** |
| **H.** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Rp 409,575,200** | **Rp 402,832,200** | **Rp 6,743,000** | **98.35** |
| 24 | Penyusunan Kajian Rawan Bencana Kabupaten/ Kota | Rp 289,793,000 | Rp 283,050,000 | Rp 6,743,000 | 97.67 |
| 25 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Rp 119,782,200 | Rp 119,782,200 | Rp - | 100 |
| **I.** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Rp 2,561,290,300** | **Rp 2,474,517,800** | **Rp 86,772,500** | **96.61** |
| 26 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota | Rp 150,000,000 | Rp 149,519,800 | Rp 480,200 | 100 |
| 27 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Rp 1,065,108,600 | Rp 1,058,902,600 | Rp 6,206,000 | 99.42 |
| 28 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 35,260,000 | Rp 34,960,000 | Rp 300,000 | 99.15 |
| 29 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota | Rp 12,504,000 | Rp 11,704,000 | Rp 800,000 | 93.60 |
| 30 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Rp 749,983,500 | Rp 743,358,500 | Rp 6,625,000 | 99.12 |
| 31 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Rp 61,774,400 | Rp 33,517,100 | Rp 28,257,300 | 54.26 |
| 32 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Rp 59,910,000 | Rp 55,035,000 | Rp 4,875,000 | 91.86 |
| 33 | Penyusunan Rencana Kontinjensi | Rp 299,475,000 | Rp 293,900,000 | Rp 5,575,000 | 98.14 |
| 34 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Rp 127,274,800 | Rp 93,620,800 | Rp 33,654,000 | 73.56 |
| **J.** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Rp 179,657,800** | **Rp 178,905,000** | **Rp 752,800** | **99.58** |
| 35 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp 179,657,800 | Rp 178,905,000 | Rp 752,800 | 99.58 |
| **K.** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **Rp 96,115,000** | **Rp 92,815,000** | **Rp 3,300,000** | **97** |
| 36 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Rp 96,115,000 | Rp 92,815,000 | Rp 3,300,000 | 97 |
| **Jumlah** | | **Rp 9,231,615,400** | **Rp 7,833,493,815** | Rp 1,398,121,585 | **84.86** |

**BAB IV**

**PERUBAHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam Perencanaan Kinerja Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai beberapa Program/Kegiatan Perencanaan, diantaranya yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur; Prosentase Pemenuhan Capaian Kinerja; Penjabaran Konsistensi Kegiatan RENSTRA kedalam Renja; Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima; Prosentase Pemenuhan Capaian Realisasi Keuangan, memiliki target 100% dengan jumlah anggaran Rp. 35.038.800,-
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan, memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 3.849.109.300,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 700.041.100,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp.12.000.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 309.156.300,-
7. Program Penanggulangan Bencana
8. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Meningkatnya indeks kapasitas/ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, dengan jumlah anggaran Rp. 91.109.400,-
9. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, indikator kinerjanya adalah Meningkatnya indeks kapasitas/ ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, dengan jumlah anggaran Rp. 1.681.764.800,-
10. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator kinerjanya adalah Meningkatnya indeks kapasitas/ ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, dengan jumlah anggaran Rp.700.000.000,-
11. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, indikator kinerjanya adalah meningkatnya indeks kapasitas/ ketahanan daerah, memiliki target 100% dengan jumlah anggaran Rp. 121.964.400 ,-

**BAB V**

**PENUTUP**

Demikian Penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dapat kami sajikan. Kami menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : Oktober 2023

--------------------------------------------------

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Cirebon

**Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si**

NIP. 19711021 200501 1 003